

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,
INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT,
DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA
PT. BPD JAWA TIMUR PERIODE 2004-2013**

Anisah

*Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Depok 16424, Jawa Barat
anisah@staff.gunadarma.ac.id*

Abstrak

Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi maupun sumber-sumber non-ekonomi secara optimal. Kesuksesan pemerintah daerah dalam mengatur, melaksanakan serta mengevaluasi dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah pemerintah pusat menilai dari beberapa indikator makro ekonomi. Indikator yang dimaksud adalah jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, serta tingkat inflasi regional pada masing-masing provinsi. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, dibutuhkannya kebijakan untuk mengusahakan semaksimal mungkin agar pemanfaatan yang sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda serta uji Anova. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat inflasi, mempengaruhi dana pihak ketiga Bank Pembangunan Daerah Jatim.

Kata kunci: *DPK, jumlah penduduk, inflasi, IPM, BPD Jatim*

**ANALYSIS OF EFFECT TOTAL POPULATION,
COMMUNITY DEVELOPMENT INDEX,
INFLATION AND THIRD PARTIES FUND
PT. BPD EAST JAVA PERIOD 2004-2013**

Abstract

Local governments should be able to improve the welfare of the people by using the economic resources and sources of non-economic optimum. The success of local government in managing, implementing and evaluating the improvement of the welfare of society in every area of the central government judging from some macro indicators ekonomi. Indikator in question is the number of the population, human development index, as well as regional inflation rate in each province. Achievement of regional economic development objectives, policies needed to seek as much as possible in order to use that line with development potential possessed by region.

This study used secondary data obtained by Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics. Data processing using multiple linear regression and ANOVA test. The results showed the total population, human development index, and the rate of inflation, affecting the third parties fund of East Java Regional Development Bank.

Keywords: DPK, population, inflation, HDI, BPD Java

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat dan daerah memberi andil dalam pembentukan pertumbuhan perekonomian pada setiap provinsi. Selain itu dibutuhkan peran dan dukungan dari sektor perbankan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank agar dapat mengelola potensi ekonomi yang dimiliki agar dapat bermanfaat secara optimal untuk masyarakat. Eksistensi serta peranan lembaga keuangan bank yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki fungsi menghimpun, menyimpan, melaksanakan kas daerah, menyediakan pembiayaan, sebagai pengembangan perekonomian daerah, pemegang keuangan daerah, penggerak pembangunan daerah dan tedalam peningkatan taraf kehidupan, masyarakat pada setiap provinsi.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang mengalami revisi UU Nomor 25/1999 menjadi Nomor 33/2004 yang membahas keseimbangan dalam keuangan pemerintah pusat dan daerah, yakni adanya sistem desentralisasi dengan memberikan peranan daerah secara luas. Dan berlakunya otonomi daerah sehingga membuka peluang setiap daerah mengelola, membangun, serta bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi maupun sumber-sumber non-ekonomi secara optimal. Meninjau kesuksesan pemerintah daerah dalam mengatur, melaksanakan serta mengevaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah, pemerintah pusat

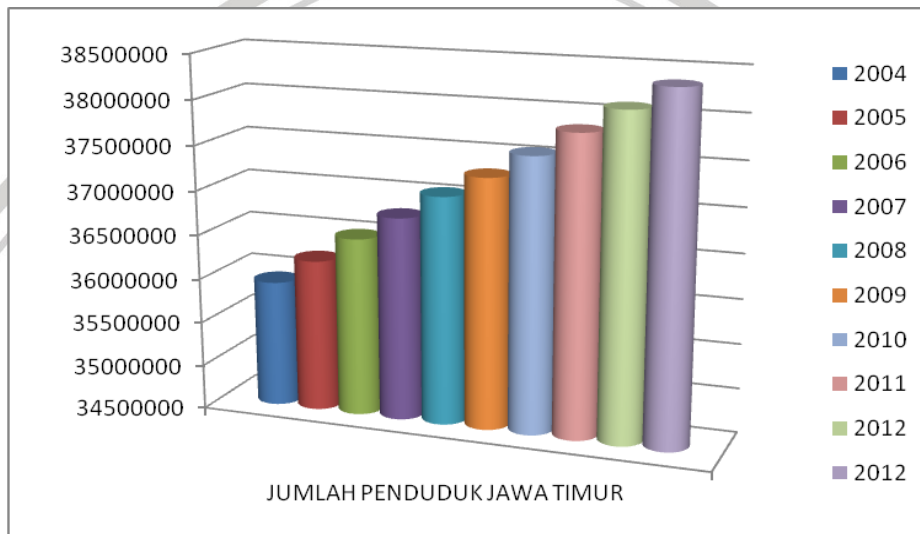
menilai dari beberapa indikator makro ekonomi. Indikator yang dimaksud adalah jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, serta tingkat inflasi regional pada masing-masing provinsi. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, dibutuhkan kebijakan untuk mengusahakan semaksimal mungkin agar pemanfaatan yang sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Potensi maupun sumber daya yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (Syafrizal, 1999). Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan pun harus disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Bank Pembangunan Daerah dan pemerintah daerah harus dapat menyatu untuk terlaksananya kesejahteraan perekonomian. Sebagai bank pada suatu daerah tentunya didasari peraturan daerah (perda), sehingga kinerja dari Bank Pembangunan Daerah tidak lepas dari daerah yang bersangkutan. Untuk mengevaluasi kaitan kemampuan Bank Pembangunan Daerah menarik kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya dan ditinjau dari beberapa indikator daerah yang terkait. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, indeks pembangunan masyarakat, dan tingkat inflasi pada provinsi Jawa Timur. 2) Mengetahui adanya hubungan jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi pada PT. BPD Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim. Penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat inflasi pada Provinsi Jawa Timur periode 2004-2013. Sedangkan variabel terikat atau tergantung dalam penelitian ini adalah

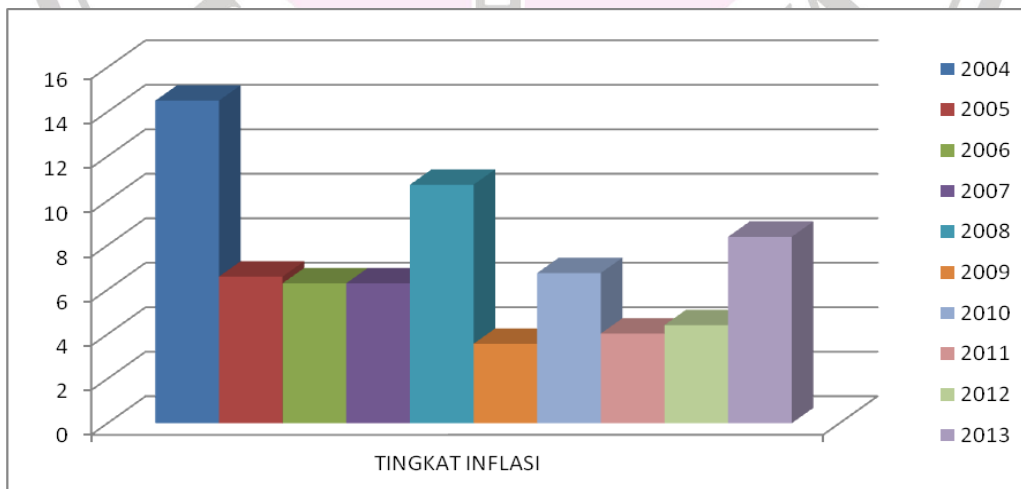
Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembangunan Daerah Jatim. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2013

Dari gambar diatas tiap tahun jumlah penduduk pada provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan terlihat pada

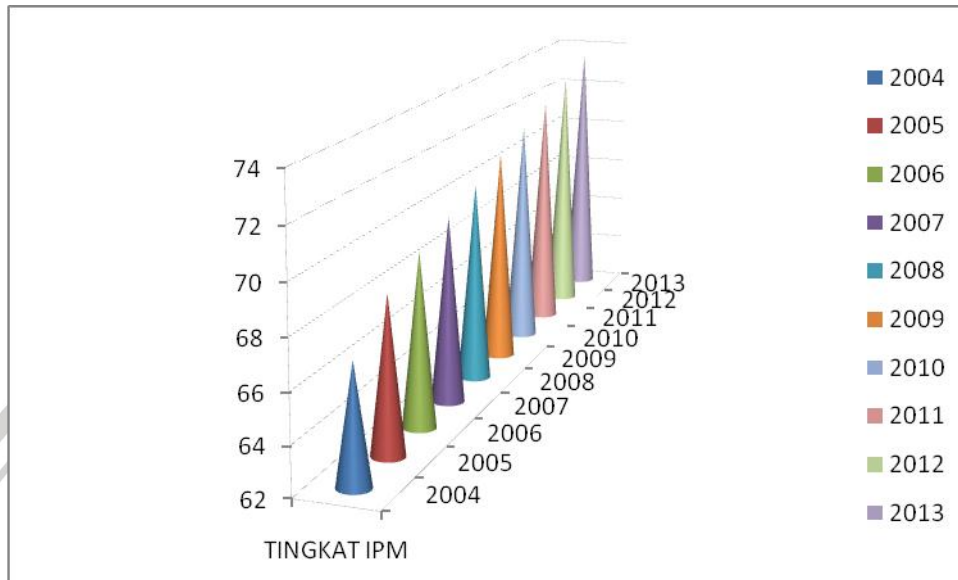
tahun 2004 35.925.900 jiwa hingga 2013 menjadi 38.363.200 jiwa yang tersebar di sembilan kota.



Gambar 2. Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2013

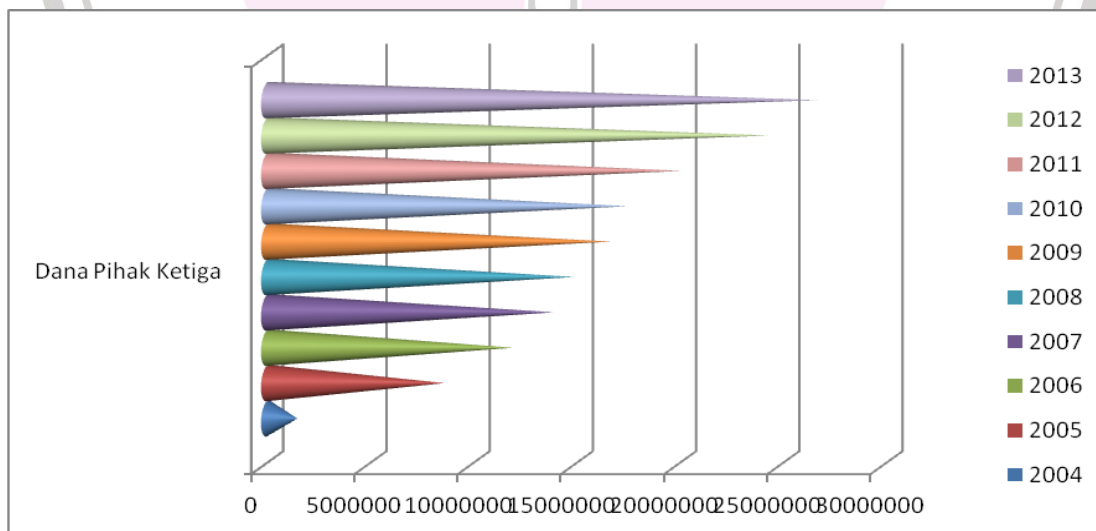
Pada gambar diatas menunjukan tingkat inflasi regional pada provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2004 sebesar 14.5 sedangkan untuk tingkat inflasi terendah pada tahun 2009 sebesar

3.57. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunya daya jual mata uang suatu negara.



Gambar 3. Tingkat IPM Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2013

Pada tahun 2013 terdapat angka provinsi Jawa Timur dan terendah sebesar 73.54 adalah tingkat IPM tertinggi di 66.85 pada tahun 2004.



Gambar 4. Dana Pihak Ketiga BPD Jatim Periode 2004-2013

Dana pihak ketiga merupakan wujud kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada BPD Jatim, berupa

giro, tabungan dan deposito. Terbesar pada tahun 2013 sebesar 26,685,561 dalam jutaan rupiah. Pada penelitian ini

untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan meliputi: data Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Inflasi pada provinsi Jawa Timur. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat, dan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Jadi untuk menghitung menggunakan program SPSS versi 17.

Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan, sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik. Berikut asumsi-asumsinya: Uji Norma-

litas, Uji Homoskedastisitas, dan Uji Multikolinieritas.

Kolerasi atau asosiasi (hubungan) antara variable-variabel yang diminati, disini dibahas dua aspek untuk analisis korelasi, yaitu apakah data sampel yang ada akan menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variable-variabel dalam populasi dan yang kedua, jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut.

H_0 : Tidak ada hubungan (kolerasi) antara dua variabel atau angka kolerasi 0

H_1 : Ada hubungan (kolerasi) antara dua variabel atau angka kolerasi tidak 0

Penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut.

$$\ln Y_1 = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu_i \text{ (Algifari, 2000:65)}$$

Dimana: Y_1 Dana Pihak Ketiga,
 X_1 Jumlah Penduduk,
 X_2 Jumlah Penduduk Miskin,
 X_3 Jumlah Pengangguran,
 $\beta_1 - \beta_3$ koefisien masing-masing variable,
 α konstanta dan μ_i Residu.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Uji Anova salah satu kegiatan statistik induktif adalah menguji sebuah hipotesis (dugaan sementara). Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian koefisien

regresi secara serempak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikansi nilai F, menggunakan SPSS 17.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kolerasi atau asosiasi antara variabel-variabel yang diminati. Aspek untuk analisis kolerasi, yaitu apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variable-variabel, serta jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar variable.

Tabel 1. Korelasi Antar Variabel

Correlations				
	DANA PIHAK KETIGA	JMLH PENDUDUK	TINGKAT INFLASI	IPM
DANA PIHAK KETIGA				
Pearson Correlation	1.000	0.974	-0.572	0.989
Sig. (1-tailed)	.	0.000	0.042	0.000

Sumber: data olahan SPSS 17

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan inflasi pada Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang nyata dengan Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembangunan Daerah Jatim. Berarti ada ketertarikan masyarakat untuk mempercayai BPD Jatim dalam penghimpunan dana serta menyalurkannya.

Pada regresi berganda terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Sedangkan, uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dan varibel dependen. Terlihat pada angka SIG. (singkatan dari Signifikansi atau besaran nilai probabilitas) yang jauh di bawah 0.025, maka dapat dikatakan koefisien regresi signifikan.

Tabel 2. Koefisien Regresi Berganda

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-177,762,741.86	44,410,976.19		-4.003	0.007
	PDDK	-6.106	5.099	-0.674	-1.197	0.276
	INFLASI	65,580.13	181,091.49	0.03	0.362	0.73
	IPM	5,948,043.48	2,100,288.88	1.675	2.832	0.03
a	Dependent Variable: DPK					

Sumber: Data olahan SPSS 17

Dengan melihat tabel di atas dapat terbentuk persamaan regresi yakni persamaan regresi dengan Dana Pihak

Ketiga pada BPD Jatim sebagai variabel tergantung (Y)

$$DPK : - 177.762.741,855 - 6,106 X1 + 65.580,134 X2 + 5.948.043,483 X3$$

Pada persamaan regresi linier dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel yang tergantung diperoleh informasi yakni jika ketiga variabel tidak ada penambahan atau pengurangan maka nilai DPK sebesar Rp - 177.762.741,855,- . Nilai Sig pada tabel diatas Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi yang mempengaruhi secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga

pada BPD Jatim. Meningkatnya jumlah penduduk serta tingkat inflasi tinggi menimbulkan minat masyarakat dalam menyimpan dananya pada Bank Pembangunan Daerah.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan

dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992(a)	.984	.975	1159272.23687

a Predictors: (Constant), IPM, INFLASI, PDDK

b Dependent Variable: DPK

Analisis dari tabel di atas adalah nilai R Square yang dimiliki Dana Pihak Ketiga posisi 0.984 ini berarti pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Inflasi memberi penga-

ruh besar pada Dana Pihak Ketiga BPD Jatim sebesar 98.4 %. Adapun sisanya ketiga variabel perbankan ini dipengaruhi faktor yang lain.

Tabel 4. Tabel Uji F

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.82444E+14	3.00	1.60815E+14	119.66	0.00
	Residual	8.06347E+12	6.00	1.34391E+12		
	Total	4.90508E+14	9.00			
a	Predictors: (Constant), IPM, INFLASI, PDDK					
b	Dependent Variable: DPK					

Sumber: data olahan SPSS 17

Nilai F pada aset, Dana Pihak Ketiga maupun Kredit yang disalurkan masing-masing sebesar 119.66 dan signifikan ketiganya memiliki nilai 0.000 , yang berarti dibawah tingkat signifikansi 5 %. Maka dapat disimpulkan Hi diterima jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan tingkat inflasi, berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga di BPD Jatim.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka

didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pada Uji Normalitas, data distribusi nilai residu (*error*) menunjukkan distribusi normal. Uji Homoskedastisitas, model regresi pada penelitian ini tidak terkena gejala heterokedastisitas. Dan uji Multikolinieritas, menunjukkan dugaan adanya multikolinieritas, yang dalam kasus ini adanya hubungan antar variabel.

Jumlah penduduk pada Jawa Timur, pada tahun 2004 35.925.900 jiwa hingga 2013 menjadi 38.363.200 jiwa dan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Untuk tingkat inflasi regional pada provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2004 sebesar 14.5 sedangkan untuk tingkat inflasi terendah pada tahun 2009

sebesar 3.57. 73.54 adalah tingkat IPM tertinggi di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, untuk terendah 66.85 pada tahun 2004. Sedangkan, dana pihak ketiga yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Jatim terbesar pada tahun 2013 sebesar 26,685,561 dalam jutaan rupiah. Tiga variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan inflasi pada Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang nyata dengan Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembangunan Daerah Jatim. Berarti ada ketertarikan masyarakat untuk mempercayai BPD Jatim dalam penghimpunan dana serta menyalurkannya.

Pada persamaan regresi linier dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel yang tergantung diperoleh informasi yakni jika ketiga variabel tidak ada penambahan atau pengurangan maka nilai DPK sebesar Rp – 177.762.741,855,- . Nilai Signifikansi pada tabel diatas jumlah penduduk dan tingkat inflasi yang mempengaruhi secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga pada BPD Jatim. Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta tingkat inflasi tinggi menimbulkan minat masyarakat dalam menyimpan dananya pada Bank Pembangunan Daerah.

Nilai R Square yang dimiliki Dana Pihak Ketiga posisi 0.984, ini berarti pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi memberi pengaruh besar pada Dana Pihak Ketiga BPD Jatim sebesar 98.4 %. Adapun sisanya ketiga variabel perbankan ini dipengaruhi faktor yang lain.

Nilai F pada aset, Dana Pihak Ketiga maupun Kredit yang disalurkan masing-masing sebesar 119.66 dan signifikan ketiganya memiliki nilai 0.000 yang berarti dibawah tingkat signifikansi 5 %. Maka dapat disimpulkan Hi diterima jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen, dan

tingkat inflasi, berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga di BPD Jatim.

Saran

Jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan indeks pembangunan daerah memiliki pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Pembangunan Daerah Jatim, maka dibutuhkan pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk Bank Pembangunan Daerah. Selain itu untuk BPD sebagai *agent of regional development* diharapkan menggerakkan perekonomian dan pembangunan daerah masing-masing. BPD merupakan bank bertujuan khusus untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, selayaknya BPD diberikan ketentuan atau regulasi yang bisa mendorong ke arah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Acocella Nicola, Ricardo Leoni. 2007. *Social Pacts, Employment and Growth*. AIEL Series in Labour Economics.
- Berger, Allen. Hasan. Klapper. 2004. *Further Evidence on the Link between Finance and Growth: An International Analysis of Community Banking and Economic Performance*. Springer, vol. 25(2), pages 169-202, April.
- Browne, S. Robert. 2008. *Development From an African Perspective: Early Success and Challenges at The Africa Development Bank*. *The Review of Black Political Economy*. September, Volume 35, Issue 2-3, pp 109-115.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- BPS. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di*

- Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2005-2009*. BPS. Jakarta.
- Cheng, Xiaqiong. Degryse. 2009. The Impact of Bank and Non-Bank Financial Institutions on Local Economic Growth in China.
- Denda Wijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- DePrince Jr., A. E., Ford, W. F., & Morris, P. D. 2011. Some Causes of Interstate Differences in Community Bank Performance. *Journal of Economics & Finance*.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Song Li, Gang He. 2011. A Panel Regression Analysis on Relativity between China Regional Economic Development and Traffic Accidents Risks. *Education and Management Communications in Computer and Informations Science*. Vol. 210 pp. 100-105.
- Sunarsip. 2008. *Relasi Bank Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah*. Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Jakarta.